

KERJA SAMA PERTAHANAN INDONESIA – AMERIKA SERIKAT MELALUI PROGRAM *FOREIGN MILITARY SALES (FMS)*

Oleh : Afrian Hidayat

email : afrian.hidayat51@gmail.com

Pembimbing : Dr. Mhd. Saeri, M.Hum

Bibliografi : 4 Buku, 2 Jurnal, 9 Website

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Diplomatic relations between Indonesia and the US in the field of defense have been very volatile for a long time, both the closeness and depth of defense cooperation. Bilateral defense cooperation is carried out in the context of improving relations between the military and to increase the professionalism of the TNI and achieving the objectives of the Indonesian state defense such as maintaining national sovereignty and integrity. Indonesia's interest in establishing defense cooperation with the US is because most of the main weapons systems (alutsista) tools come from the US with the Foreign Military Sales (FMS) program which aims to build a modern military. This study uses qualitative methods with data from library sources and secondary sources such as books, papers and materials from other open sources. This study uses the Liberalism Perspective, Level of Analysis of nation-states, and International Cooperation Theory. The results of this study are that the Foreign Military Sales (FMS) Program has had a significant impact on increasing Indonesia's security capacity in the fields of terrorism prevention, maritime security, and increasing world peacekeeping operations personnel through purchasing defense equipment, increasing TNI professionals, and increasing military budgets. Defense cooperation between Indonesia and the US will be largely determined by regional security dynamics so Indonesia must develop innovative ideas in the regional area by involving large countries such as the United States.

Keywords: *Foreign Military Sales (FMS), Defense Diplomacy, Defense Cooperation*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara berkembang di wilayah Asia Tenggara tentunya memperhatikan sektor pertahanan dan keamanan nasionalnya. Sektor pertahanan dan keamanan Indonesia diperkuat dengan Personel Prajurit aktif sebanyak kurang lebih 400.000 personel, 445 Alutsista Udara, 2.387 Alutsista Darat, dan 523 Alutsista Laut. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan militer pertama di wilayah Asia Tenggara, dan meraih peringkat ke 15 di kancah dunia internasional berdasarkan data dari *Global FirePower* per tahun 2022.¹ diharapkan akan membuka lingkup kerjasama ekonomi yang lebih luas antara komunitas halal di kedua negara, menyediakan peluang dalam bisnis yang baru dan inovatif. Proyek-proyek dalam kerjasama ini berfokus pada peningkatan perdagangan, transfer teknologi, investasi dan pengembangan riset halal. Selain itu kolaborasi ini tentu akan menguntungkan Malaysia dan Korea Selatan dan memperkuat hubungan kedua negara tersebut.²

Karena itu, dalam rangka modernisasi alutsista guna meningkatkan kekuatan militernya, Indonesia tentunya perlu menjalin kerjasama dengan negara lain di bidang pertahanan dan keamanan dengan beberapa negara baik regional maupun internasional. Hal ini berdasarkan

prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Bebas bermakna bahwa Indonesia menjalin kerjasama dengan negara manapun sesuai dengan kepentingan negara dan melihat dari keuntungan bersama. Sedangkan aktif bermakna bahwa Indonesia ikut berkontribusi dalam memperjuangkan perdamaian dan keadilan sosial dunia. Prinsip ini membuat Indonesia memiliki banyak negara mitra karena Indonesia merupakan “bridge builder” atau pembangun jembatan.³

Salah satu negara yang bekerjasama dengan Indonesia adalah Amerika Serikat, di mana dengan kerjasama tersebut Indonesia dapat meningkatkan efisiensi anggaran, karena alutsista dibeli dengan sistem pinjaman luar negeri. Amerika Serikat merupakan salah satu negara mitra kerjasama Indonesia yang sudah dijalin sejak tahun 1949.

Program kerjasama yang ditawarkan Amerika Serikat dalam hal ekspor alutista ke Indonesia dipayungi oleh *Foreign Military Sales (FMS)*. *Foreign Military Sales (FMS)* merupakan sebuah program pemerintah Amerika Serikat untuk menjalin kerjasama internasional dalam bidang pertahanan dan keamanan, penjualan alat dan sistem persenjataan, layanan dan pelatihan pertahanan dan keamanan kepada para mitra internasional dimana Indonesia sendiri merupakan salah satu mitra

¹ Global Firepower, “2022 Indonesia Military Strength,” *Global Firepower - World Military Strength* (Globalfirepower.com, 2022), diakses pada 16 Juni, 2022, https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=indonesia.

² Ibid

³ Benedikta Miranti T.V, “Makna Hubungan Bilateral Antara Indonesia Dan Negara Lain Dalam Dunia Diplomasi,” *liputan6.Com* (Liputan6, 22 January, 2021), diakses pada 20 Mei, 2022, <https://www.liputan6.com/global/read/4464156/makna-hubungan-bilateral-antara-indonesia-dan-negara-lain-dalam-dunia-diplomasi>.

Amerika Serikat dalam program ini. Indonesia sendiri telah menjadi bagian dari program FMS ini sejak tahun 2010.

Kerjasama yang dijalin oleh Amerika Serikat dan Indonesia ini akan berdampak pada kondisi hubungan bilateral kedua negara yang tentunya memiliki dampak yang positif. Amerika Serikat yang hingga kini masih menjadi importir alutsista terbesar bagi Indonesia juga merasakan dampak dari kerjasama ini terhadap perekonomian mereka. Begitu pula dengan Indonesia yang menerima alutsista dari AS dalam rangka modernisasi alutsista guna menjaga kedaulatan NKRI.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang “Kerjasama Pertahanan Indonesia-Amerika Serikat melalui *Foreign Military Sales (FMS)*).

Kerangka Teori

Perspektif Realisme

Perspektif yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah perspektif Realisme. Dalam Hubungan Internasional, realisme politik adalah tradisi analisis yang menekankan keharusan-keharusan yang dihadapi negara-negara untuk mengejar politik kekuasaan untuk kepentingan nasional.

Teori realisme juga sering disebut sebagai “spektrum ide. Realisme sebagai spektrum ide juga melingkupi 4 dalil inti

yaitu *Political Groupism, Egoism, International Anarchy*, dan juga *Power Politics*.⁴

Selanjutnya, ada beberapa asumsi dasar dari teori realisme dalam hubungan internasional, yaitu: 1. *State are the principal or most important actor* (Negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional) 2. *The state is viewed as a unitary actor* (Negara dipandang sebagai *unitary actor*) 3. *The state is essentially a rational actor* (Negara dianggap sebagai aktor rasional) 4. *National security usually top the list* (Kemanan nasional selalu mendominasi politik dunia) Teori Realisme berkembang dan berdasarkan pada pemikiran bahwa *man is evil*, di mana negara sebagai satu individual yang tidak akan bekerjasama dengan aktor lain tanpa ada maksud tertentu (*self-interests*) dan akan selalu berusaha untuk memperkuat dirinya sendiri.

Teori Kerja Sama Internasional

Teori kerjasama internasional berfokus pada kajian-kajian studi hubungan internasional yang mengkaji tentang lingkup kerjasama internasional antar negara.

Kerja sama internasional meliputi hubungan antara dua negara atau hubungan antara sejumlah besar unit, yang dikenal sebagai multilateralisme. Meskipun pengaturan kerjasama sering muncul antara dua negara, fokus utama kerjasama internasional adalah multilateral.⁵

⁴ Jack Donnelly, “The Ethics of Realism”, in Christian Reus-Smit, Duncan Snidal (eds.), *The Oxford Handbook of International Relations*, Oxford University Press, 2008, hlm. 150

⁵ James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff, “*Contending Theories of International Relations A Comprehensive*” Survey Fifth Edition. Publisher: Priscilla McGeehon. 2001. hlm: 505

Tingkat Analisis Negara-Bangsa

Dalam menganalisis masalah yang ada pada penelitian ini, penulis tentunya juga membutuhkan tingkat analisis untuk mempermudah menguraikan dan mengidentifikasi masalah penelitian sekaligus dapat memfokuskan arah penulisan dan masalah yang akan diteliti. Mohtar Mas'ood dalam bukunya yang berjudul "Ilmu Hubungan Internasional "Disiplin dan Metodologi" membagi tingkat analisa kedalam lima kelompok yaitu Perilaku Individu, Perilaku Kelompok, Negara-Bangsa, Pengelompokan Negara-Negara dan Sistem Internasional.⁶

Dalam penelitian ini, digunakan tingkat analisa Negara-Bangsa. Korelasinya adalah negara sebagai aktor utama dan menjadi fokus penelitian. Negara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Indonesia dan Amerika Serikat yang menjalin hubungan kerjasama melalui *Foreign Military Sales (FMS)*. Negara juga berperan sebagai pembuat keputusan dan pengambil kebijakan dalam hubungan internasional.⁷

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan memaparkan gambaran tentang situasi atau fenomena sosial secara rinci. Dalam penelitian ini akan dipaparkan tentang gambaran kerjasama yang dijalin oleh negara

Indonesia dengan Amerika Serikat melalui program *Foreign Military Sales (FMS)*.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*). Data- data penelitian diperoleh dari beberapa sumber bacaan seperti buku, jurnal, website resmi, dokumen dan sebagainya.

Pembahasan

Bentuk kerjasama Pertahanan Indonesia- Amerika Serikat Melalui Program *Foreign Military Sales (FMS)*

Indonesia merupakan negara yang memiliki peran di kawasan dan posisi penting bagi pengaruh Amerika Serikat sebagai kekuatan global dengan jangkauan kebijakan luar negeri sekaligus jangkauan kekuatan militer yang sangat luas, hal tersebut membuat kedua negara menjalin hubungan kerjasama pertahanan dan keamanan yang di laksanakan dengan cara dialog, latihan bersama dan bantuan militer yang diberikan Amerika Serikat terhadap militer Indonesia.

Mengingat salah satu "pemasok" terbesar alutsista TNI adalah Amerika Serikat (AS), maka mekanisme "G-to-G" dengan AS-yang salah satunya adalah *Foreign Military Sales (FMS)*-

Program FMS merupakan bagian dari kegiatan Security Assistance yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat dengan memberikan bantuan melalui penjualan produk, pelayanan pemeliharaan, atau pelatihan di bidang

⁶ Mohtar Mas'ood : *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. hlm. 40

⁷ Hartanto, "Tingkat Analisa Dalam Hubungan Internasional," *SlidePlayer* (Slide Player, 2015),

diakses pada 20 Mei, 2022,
<https://slideplayer.info/slide/3633644/>.

pertahanan kepada negara asing yang memenuhi persyaratan.

Barang FMS dapat berasal dari SoS meliputi:

- a. Shelf Stock (Inventory) dari Depo masing-masing yang berada di Angkatan Bersenjata Amerika Serikat;
- b. Kontraktor dalam memenuhi barang yang dibutuhkan dapat berasal dari pengadaan Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang sedang berjalan baik berupa pengadaan baru maupun hasil overhaul/ perbaikan; dan
- c. Excess Defence Articles berasal dari barang yang sudah tidak dipakai lagi oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat.

Sementara Dana untuk pengadaan melalui FMS dapat berasal dari:

- a. Kredit FMS (pinjaman/loan), berasal dari anggaran Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan dari luar anggaran Departemen Pertahanan Amerika Serikat;
- b. Pinjaman/Loan yang dilakukan oleh Federal Financing Bank berada dibawah Departemen Keuangan Amerika Serikat;
- c. Sumber dana kredit FMS dapat berupa:
 - 1) Kredit dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat disebut kredit konsesi atau kredit langsung,
 - 2) Kredit yang diambil dari anggaran Pemerintah Amerika Serikat di luar anggaran Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang pemberiannya ditentukan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, yang disebut dengan Guarantee Credit.

Selain FMS, ada bentuk akuisisi yang lain dalam kerangka “G-to-G” dengan AS, yaitu Direct Commercial Sales (DCS). Dalam hal ini, Pemerintah RI langsung berkontrak dengan industri AS, dan Pemerintah AS hanya terlibat dalam penerbitan export license (EL) kepada industri yang bersangkutan. Dari sisi waktu pemenuhan materiil kontrak, DCS

umumnya lebih cepat. Namun demikian, terdapat opsi berikutnya berupa mekanisme hybrid antara FMS dan DCS, yang tentu saja harus didahului dengan perhitungan soal waktu dan nilai ekonomis (mana yang dipesan melalui FMS, mana yang melalui DCS).

Tinjauan terhadap FMS dapat dilakukan dari beberapa aspek fundamental, antara lain:

a. Politik.

FMS merupakan bagian dari program kerjasama internasional AS di bidang pertahanan, dan subsistem dari portofolio kebijakan luar negeri AS. Norma hakiki dari kebijakan luar negeri negara manapun selalu bermuara pada “kepentingan nasional”, termasuk apa yang dilakukan AS melalui FMS. Artinya, apapun ide, konsep serta filosofi yuridis formal Pemerintah AS, FMS tetap merupakan salah satu upaya Pemerintah AS mewujudkan kepentingan nasional negaranya

b. Ekonomi

Dari perspektif ekonomi, ada beberapa tinjauan yang dapat dilakukan: FMS bukan implemmentasi bisnis murni antara ‘penjual’ dengan ‘pembeli’. Namun dalam FMS, pembeli tetap terikat dengan sejumlah ketentuan yang membatasinya dalam menggunakan setiap item yang dibeli melalui FMS, termasuk memberikan izin kepada otoritas AS dalam melakukan end use monitoring.

c. Pertahanan

Dari perspektif pembangunan kekuatan, khususnya untuk non-major items atau non-major defense equipment (non-MDE), FMS menawarkan solusi yang cukup menjanjikan. Untuk MDE, Indonesia harus memperhitungkan dengan cermat soal lead time ini, hingga tetap selaras dengan rencana strategis pembangunan kekuatan pertahanan.

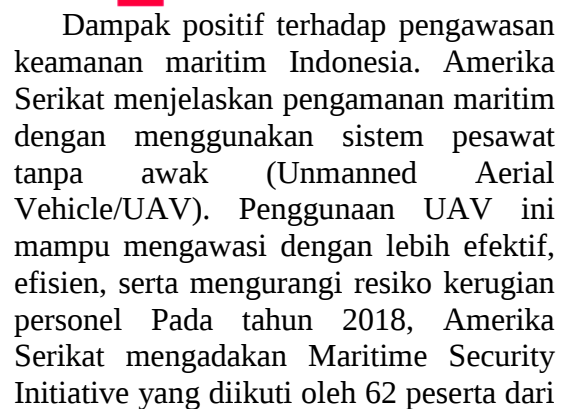
Dampak Kerjasama Pertahanan Indonesia – Amerika Serikat Melalui Progrma Foreign Military Sales (FMS) Bagi Indonesia

Dampak positif kerjasama Indonesia-AS melalui FMS terhadap peningkatan kapabilitas Negara Republik Indonesia dalam bidang keamanan dan pertahanan adalah sebagai berikut:

Kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam CTFP berperan terhadap militer Indonesia dalam menangani aksi terorisme di Indonesia, tetap memberikan keuntungan bagi Indonesia. Melalui pelatihan non-lethal yang diberikan oleh Amerika Serikat

b. Keamanan Maritim Indonesia

Region	1	2	4	17	18	2	3	3	31
Brazil	23	46	18				26		113
Canada	6	6	2					3	17
China	34	38	40	34	16	14	17	2	195
Czechia			6			12			18
Denmark		5				2			6
France	18	54	39	98	15	57	48	23	350
Germany	85	29	113	76	20	0	0	20	343
Israel								3	3
Italy	8			24	30				62
Netherlands	3			449					432
Norway							20	20	40
Poland			1						1
Russia	54							9	63
South Korea	136	6		150	150	86	6	151	684
Spain	32	24	4						39
Sweden				0					0
Switzerland	33	90				4	61		188
Thailand						1			1
Ukraine		0	4				0		4
United Kingdom	589	15	32	41	2	12			691
United States	150	83	94	246	90	21	88	91	862
Total	1190	438	380	1169	339	212	269	528	4325



⁹ Rilistya, Cesarani. 2016. Implementasi Kerjasama Indonesia Dengan As Dalam Penanganan Aksi Terorisme Di Indonesia. *Journal of International Relations*, (2)1:166-173.

Indonesia dengan dana yang kucurkan sebesar \$829,738¹⁰.

c. Operasi Menjaga Perdamaian Dunia

Peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia meningkat dari tahun ke tahun sebagai dampak positif kerjasama Indonesia- Amerika Serikat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah personel militer Indonesia yang dikirim untuk menjaga perdamaian dunia.

d. Peningkatan Profesionalisme TNI

Program Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional (IMET) adalah program berbiaya rendah dan merupakan komponen sangat efektif bantuan Amerika Serikat. Kerjasama pendidikan dan latihan militer antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam meningkatkan kapabilitas profesionalisme TNI melalui program International Military Education and Training (IMET).

Program Foreign Military Sales (FMS) Program FMS melibatkan penjualan dari pemerintah-ke-pemerintah pertahanan Amerika Serikat seperti artikel, layanan, dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan kerjasama keamanan, termasuk pendidikan militer profesional dan pelatihan teknis yang berkaitan dengan pembelian peralatan, dijual ke luar negeri melalui program FMS¹¹.

e. Pembaruan dan Pengadaan Alutsista

Melalui program FMS, Indonesia dapat menambah jumlah alutsista sebesar kurang lebih 40% dari tahun 2014 dan mengadakan 30 AIM-9X-2 rudal Sidewinder dan sistem terkait agar mampu mengalahkan ancaman terhadap stabilitas regional dan dalam negeri.

f. FMS menjadi Kontributor bagi Indonesia Menjadi Negara Terkuat di Lingkup Regional

AS telah mengalokasikan dana 1,88 miliar dolar AS dalam kontrak penjualan aktif antar pemerintah di bawah sistem Penjualan Militer Asing (FMS).

Indonesia juga pernah diberi pinjaman lebih dari 5 juta dolar AS untuk pengembangan kapasitas kelembagaan pertahanan dari TA 2016 hingga TA 2020. Layanan ini berfokus pada peningkatan sumber daya manusia untuk perencanaan strategis, penganggaran, keberlanjutan, dan keamanan maritim.

Negara dengan kekuatan militer nomor satu dunia ini juga mengakui, Indonesia merupakan kontributor pasukan yang signifikan untuk operasi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dengan lebih dari 2.750 personel yang dikerahkan untuk delapan misi perdamaian di mana Indonesia saat ini berpartisipasi dalam Satgas Maritim UNIFIL

Hambatan- hambatan Kerjasama Pertahanan Indonesia- Amerika Serikat melalui Program *Foreign Military Sales (FMS)*

Meskipun kerjasama antara Indonesia- Amerika telah berjalan dengan baik, namun tentu saja memiliki hambatan- hambatan di antara nya:

a. Minimnya Anggaran Pertahanan Indonesia

¹⁰ Foreign Military Training Report. 2018. Diakses dari https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/12/FMT_Volume-I_FY2018_2019.pdf pada tanggal 6 Desember 2022

¹¹ Foreign Military Training Report. 2018. Diakses dari https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/12/FMT_Volume-I_FY2018_2019.pdf pada tanggal 6 Desember 2022

Anggaran pertahanan Indonesia berada di bawah negara-negara di Asia Tenggara yang pada umumnya memiliki anggaran pertahanan di atas 2% dari PDB. Kemampuan anggaran pertahanan tersebut baru dapat memenuhi 32,2% kebutuhan Dephan atau TNI.¹²

Dalam pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI, langkah yang diupayakan melalui pengalihan sebagian pinjaman luar negeri menjadi pinjaman dalam negeri terutama terhadap penyediaan Alutsista yang selama ini dibiayai dengan menggunakan fasilitas kredit ekspor. Namun, kebijakan tersebut belum dapat berjalan dengan baik karena belum ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pinjaman dalam negeri sehingga penggunaan pinjaman luar negeri dalam memenuhi kebutuhan Alutsista TNI belum dapat dielakkan.

Komitmen Pemerintah dalam pemanfaatan produk industri pertahanan nasional untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI juga belum dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut terkait dengan keterbatasan kemampuan dan kapasitas industri pertahanan nasional dalam memproduksi Alutsista TNI, keterbatasan penguasaan teknologi militer Indonesia, serta belum optimalnya upaya menyinergikan industri pertahanan nasional. Di samping itu, untuk mencapai kemandirian industri dan teknologi militer bagi pertahanan negara dibutuhkan proses dan waktu yang cukup panjang dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan.

b. Evaluasi Peningkatan Kapabilitas Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Dengan kerjasama pertahanan dan keamanan yang dijalin dengan Amerika Serikat melalui dialog keamanan IUSSD, hubungan militer antara kedua negara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak awal diadakannya dialog keamanan, TNI sebagai pihak yang terlibat langsung dalam setiap program dari hasil dialog itu mendapatkan banyak hal baru yang dapat digunakan untuk terus mempertahankan keamanan negara.

Namun pengaruh yang didapatkan TNI dari realisasi IUSSD tidak terlalu signifikan karena selain pengaruh embargo militer, TNI juga tidak didukung dengan anggaran pertahanan yang memadai. TNI hanya mengalami peningkatan dari segi kemampuan teknis personil, untuk Alutsista TNI belum menunjukkan peningkatan yang baik, karena jumlahnya masih kurang dari batas minimum yang harus dimiliki untuk negara sebesar Indonesia.

Simpulan

Kerjasama pertahanan dan keamanan Indonesia dilakukan, antara lain, untuk mencari perimbangan antara kebutuhan untuk menyikapi stabilitas keamanan regional, peningkatan kapabilitas pertahanan, dan kemandirian pertahanan dan keamanan Indonesia. Keberhasilan pelaksanaan kerjasama pertahanan dan keamanan Indonesia sangat bergantung pada upaya-upaya kerjasama yang dilakukan Indonesia di tingkat global,

¹² Wamenhan Tegaskan Penggunaan Anggaran Harus Efektif, Efisien dan Tepat Guna <https://www.kemhan.go.id/2022/08/29/wamenhan>

[-tegaskan-penggunaan-anggaran-harus-efektif-efisien-dan-tepat-guna.html](#), diakses pada 6 Desember 2022

regional, dan bilateral. Khusus untuk kerjasama pertahanan dan keamanan Indonesia-AS, di tingkat strategi global Amerika Serikat (AS), Indonesia telah ditempatkan pada skala prioritas tinggi.

Program *Foreign Military Sales* (FMS) memberikan dampak signifikan dalam peningkatan kapasitas keamanan Indonesia di bidang pencegahan terorisme, keamanan maritime, dan bertambahnya personil operasi penjaga perdamaian dunia melalui pembelian alutsista, peningkatan profesional TNI, dan peningkatan anggaran militer.

Namun, kerjasama yang dijalin antara Indonesia-AS juga kerap mengalami hambatan-hambatan seperti salah satunya adalah kebijakan Amerika Serikat yang membatasi Negara-negara mitra untuk bekerjasama atau membeli alutsista dari Negara *rival* seperti Russia, Iran dan Korea Utara melalui kebijakan sanksi CAATSA (*Countering America's Adversaries Through Sanctions Act*). Hal ini tentu menjadi dilema dan mempengaruhi Pemerintah Indonesia untuk menentukan kebijakan yang terbaik.

Kerjasama pertahanan antara Indonesia-AS akan sangat ditentukan oleh dinamika keamanan regional. Indonesia harus kembali aktif mengembangkan gagasan-gagasan inovatif tentang pengaturan keamanan regional di Asia Tenggara yang di dalamnya mengatur pelibatan negara-negara besar, termasuk AS.

Daftar Pustaka

- A. A. Banyu Perwita dan Yayan M. Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, (Bandung: PT Rosda Karya) hlm.28
Al Jazeera, "The Muslims of South Korea Religion," diakses 17 July 2022,

<https://www.aljazeera.com/amp/gallery/2017/11/15/the-muslims-of-south-korea>.

Department of Statistic Malaysia, "Home," diakses 15 Juni 2022, <https://www.mycensus.gov.my/>.

Gi Yeon Koo. "Islamophobia and the Politics of Representation of Islam in Korea", *Journal of Korean Religions* Vol. 9, No. 1, Religions in Cold War Korea and Peacemaking (April 2018), hlm. 159-192

James Noh, "Korean Halal SMEs Strategy Shift under the COVID19 Pandemic Halal SMEs, Incentives and Government Support," diakses 17 July 2020. <https://isef.co.id/wp-content/uploads/2020/10/6.-PPT-JAMES->

Lamy, Steven L., "Contemporary Mainstream Approaches: Neo-realism and Neoliberalism," dalam *The Globalization of World Politics*, 2001, 2nd edition. John Baylis & Steve Smith (eds.), Oxford: Oxford University Press

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004)

"Muslim-Friendly Hospitality Services," Islamic Tourism Centre of Malaysia, diakses 12 November 2022, <https://itc.gov.my/industry/islamic-tourism-standards/muslim-friendly-hospitality-services/>.

Malaysian Investment Development Authority, "MIDA, KOSME & Korea Desk Join Hands to Promote More Business Partnerships between Malaysia and Korea" diakses 16 Januari 2023, <https://www.mida.gov.my/media-release/mida-kosme-korea-desk-join-hands-to-promote-more->

[business-partnerships-between-malaysia-and-korea/](#)

- “Malaysia: HDC to Champion Bigger Halal Market Space in South Korea,” Halal Development Corporation, diakses 12 November 2022,
<https://hdcglobal.com/news/2021/07/27/malaysia-hdc-to-champion-bigger-halal-market-space-in-south-korea/>.
- Halal Development Corporation, “Korea Institute Ink MoU to Promote Muslim-Friendly Hospitality Services,” diakses 16 Juni 2022,
<https://hdcglobal.com/news/2021/07/30/hdc-korea-institute-ink-mou-to-promote-muslim-friendly-hospitality-services/>.
- Salaam Gateway, “Halal Food Products Nudging a Place in South Korea’s

Economy,” diakses 13 November 2022,

<https://salaamgateway.com/story/halal-food-products-nudging-a-place-in-south-koreas-economy>.

Scott Burchill, *The National Interest in International Relations Theory*, (New York: Palgrave Macmillan, 2005)

State of the Global Islamic Economy, “State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021,” diakses 7 Juni 2022,
<https://haladinar.io/hdn/doc/report2018.pdf>.

Vinsensio Dugis, “*Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik*” (Surabaya: Cakra Studi Global Strategis, 2016)